



http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

SUMBANGAN
DOMPET KR "COVID-19"

REKENING BCA
NO. : 126.556.5656
A/n : BP KEDAULATAN RAKYAT PT
NB : SEBAGAI BUKTI MOHON STRUK TRANSFER DI KIRIM KE NO.WA : 081.2296.0972

SELASA KLIWON

6 OKTOBER 2020 (18 SAPAR 1954 / TAHUN LXXVI NO 10)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Fraksi Demokrat DPR 'WO' RUU Cipta Kerja Kini Resmi UU

JAKARTA (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (5/10).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin rapat menanyakan persetujuan para anggota yang hadir dalam forum tersebut. "Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak bersama. Sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" tanya Azis yang langsung dijawab koor, "Setuju." Setelah itu ketukan palu Azis pun dijatuhkan pertanda regulasi sapu jagat itu sah menjadi UU.

Rapat paripurna ini diwarnai langkah *walk out* (WO) dari Fraksi Partai Demokrat. Alasannya,

fraksi ini tak diizinkan untuk menyampaikan penolakan terhadap RUU tersebut. Kejadian ini bermula ketika anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman yang ingin menginterupsi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, perihal pengambilan keputusan tingkat II RUU Cipta Kerja. Namun, Azis tak mengizinkan dan meminta agar hal tersebut dilakukan setelah pandangan dari pemerintah. "Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah," tegas Azis.

Benny kemudian meminta waktu satu menit

untuk menyampaikan pandangannya. Namun, Azis meminta agar pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terlebih dahulu menyampaikan pandangannya. "Kalau demikian kami Fraksi Demokrat menyatakan *walk out* dan tidak bertanggung jawab," ujar Benny yang kemudian meninggalkan ruang rapat, diikuti anggota Fraksi Demokrat lainnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) sekaligus panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan hasil rapat Baleg DPR bersama pemerintah. Hasilnya, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Sementara, Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak RUU Cipta Kerja disahkan.

* Bersambung hal 7 kol 5



Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa berdialog dengan prajurit TNI secara virtual ketika memimpin Upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin (5/10).

HUT Ke-75 TNI Momentum Modernisasi

JAKARTA (KR) - Memasuki usia ke-75, Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu meningkatkan kemampuannya, termasuk di antaranya modernisasi, baik aspek sumber daya manusia (SDM) maupun alutsista. Dengan langkah ini, diharapkan TNI semakin kuat di masa mendatang.

Harapan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Dr Sukamta terkait HUT ke-75 TNI, Senin (5/10). "Dari sisi SDM perlu didorong semakin modern dan profesional, mengingat perkembangan teknologi

bergerak sangat cepat juga perubahan tatanan global yang tentu berpengaruh terhadap dinamika nasional," ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI yang berasal dari Dapil DIY.

Menurut Sukamta, upaya peningkatan kualitas SDM TNI ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dengan menaikkan gaji dan tunjangan prajurit TNI. Selanjutnya, modernisasi yang tidak kalah penting dilakukan terkait dengan alutsista. Menurutnya meskipun kekuatan TNI pada tahun 2020

ini pada posisi 16 dari 137 negara dan menjadi yang terkuat di ASEAN, tetapi dari sisi modernisasi persenjataan masih tertinggal dibanding beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Singapura.

Sedangkan Upacara Peringatan HUT ke-75 Tentara Nasional Indonesia (TNI) digelar di Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI kepada seluruh perwira, purnawirawan, dan prajurit TNI. (Jon/Sim)-d

Analisis KR Mengesahkan RUU Cipta Kerja

Nindry S Widiastiani SH/MS



PEMBAHASAN RUU Cipta Kerja atau omnibus law telah mencapai tahap final. Rapat Panja Baleg DPR dengan Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang jumlahnya melebihi 7.000.

Sejak awal perencanaannya, RUU Cipta Kerja selalu mengundang penolakan keras dari pihak-pihak terkait. Pada klaster ketenagakerjaan, penolakan ini digambarkan oleh pihak pekerja karena tidak melibatkan pekerja. Pasal-pasal RUU Cipta Kerja dinilai merugikan hak-hak pekerja. Perubahan substansial dalam RUU Cipta Kerja ini terletak pada aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Upah Minimum, Waktu Kerja, Kompensasi PHK dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Sejak desas-desus pengesahan terdengar, geliat penolakan pihak pekerja semakin jelas terdengar. Rencana demonstrasi besar-besaran, hingga peluncuran tagar #BatalkanOmnibusLaw dan #JegalSampaiBatal berlalulalang di berbagai platform sosial media.

* Bersambung hal 7 kol 1

PRO KONTRA PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Meski Belum Optimal Tapi Lebih Aman

YOGYA (KR) - Meski pro dan kontra, pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui online dinilai paling efektif diterapkan, meski masih banyak kekurangan. Sehingga hasilnya belum optimal. Namun demikian, model tersebut paling aman bagi siswa maupun guru ketika terjadi wabah Covid-19.

Demikian dikemukakan Pakar Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Dr Suyanto dalam bincang editorial bersama Redaktur Pelaksana KR, Primaswolo Sudjono yang disiarkan di channel YouTube di Kedaulatan Rakyat TV, Senin (5/10).

Sejauh ini, menurut Prof Suyanto, evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terus dilakukan oleh pemerintah. Meski sejumlah

evaluasi dan penyempurnaan terus dilakukan. "Dalam menyikapi hasil evaluasi PJJ pemerintah menghadapi persoalan yang tidak mudah. Khususnya berkaitan dengan sejumlah persoalan yang mewarnai pelaksanaan PJJ. Misalnya saja siswa men-

geluhkan tidak ada kuota saat PJJ, namun begitu kuota diberikan, ternyata tidak memecahkan masalah. Setelah kuota ada ternyata muncul masalah lain, jadi PJJ atau daring itu tidak sekadar masalah kuota saja. Selain itu tidak setiap keluarga memiliki

gadget, selain itu jaringan juga sering jadi masalah," kata Prof Suyanto.

Selain itu, dalam hal capaian hasil pembelajaran, model daring hasilnya tidak bisa maksimal. Meski begitu guru atau orangtua tidak perlu memaksakan diri, karena dikhawatirkan bisa

membebani siswa. Supaya hal itu tidak terjadi perlu kreativitas dan inovasi guru, supaya siswa bisa belajar dengan nyaman dan materi mudah dipahami.

Saat dimintai tanggapan soal adanya usulan tentang dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah. Guru besar UNY itu menjelaskan, sebelum nantinya pembelajaran tatap muka itu benar-benar diterapkan, butuh kecermatan perencanaan. Karena seandainya kebijakan itu dilaksanakan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekolah, supaya tidak terjadi penularan Covid-19. Salah satunya selain sekolah berada di zona hijau dan dapat rekomendasi dari Pemda bahwa sekolah itu benar-benar aman. (Ria/Ira)-d



JADWAL SALAT table with columns for Zuhur, Asar, Magrib, Isya, Subuh and times for Selasa, 6 Oktober 2020.

DOMPET 'KR' Bersama Kita Melawan Virus Korona Mipunani Tumraping Liyan

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA 126.556.5656 atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA 081 2296 0972. Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

Table with columns: NO, NAMA, ALAMAT, RUPIAH. Includes entry for 661 Bebby with amount 100,000.00.

s/d 04 Oktober 2020 Rp 366,800,000.00 s/d 05 Oktober 2020 Rp 366,900,000.00 (Tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Siapa menyusul?

BELUM ADA OBAT COVID-19

Remdesivir Hanya untuk 'Emergency Use'

YOGYA (KR) - Remdesivir, menjadi obat yang saat ini ramai diperbincangkan. Obat antivirus ini telah mendapat persetujuan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk digunakan sebagai salah satu obat yang dapat diberikan kepada pasien Covid-19 di Tanah Air.

"Obat ini diberikan izin edar dalam bentuk Emergency Use Authorization (EUA). Artinya, izin penggunaan obat diberikan secara darurat karena belum ada obat Covid-19 yang definitif dan disetujui. Bukan keadaan darurat karena pasien dalam kondisi darurat ya," terang pakar farmakologi dan farmasi klinis dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Zullies Ika-wati Apt, Senin (5/10).

Menurut Zullies, remdesivir tidak bisa didapat secara bebas di pasaran karena langsung didistribusikan ke rumah sakit dan tidak tersedia di apotek. Obat ini dalam beberapa bulan terakhir dipakai dalam uji coba oleh WHO. Sejumlah negara juga menggunakan obat tersebut dan hasilnya menunjukkan adanya efektivitas yang

baik dalam pengobatan pasien Covid-19. Pemberian remdesivir mampu mempersingkat masa penyembuhan pasien Covid-19.

Zullies menjelaskan, remdesivir adalah senyawa analog (mirip) dengan adenosine dan bisa menyusup ke dalam rantai RNA. Obat ini bekerja dengan menghambat replikasi virus dalam tubuh. "Rem-

desivir merupakan obat antivirus. Dulu dikembangkan untuk mengatasi virus-virus RNA dan pernah dicobakan saat ada wabah Ebola dan MERS," tutur Guru Besar Farmakologi, Fakultas Farmasi UGM ini.

Zullies menyampaikan, remdesivir hanya boleh digunakan pada pasien terkonfirmasi positif Covid-19

dengan usia di atas 12 tahun dan berat badan minimal 40 kg.

* Bersambung hal 7 kol 5



Prof Zullies Ika-wati Apt PhD dan obat remdesivir.

SUNGGUH SUNGGUH Terjadi

SELAMA pandemi Covid-19 ini saya sudah tiga kali potong rambut di tempat berbeda. Tiga kali saya lupa melepas masker ketika sudah duduk dan siap dipotong. Namun tiga tukang potong rambut itu komentarnya hampir sama. "Sekarang memang ke mana-mana harus pakai masker. Tetapi kalau sedang potong rambut, masker tidak dilepas, tali masker bisa ikut tergantung." (Wahib Mubarak, Sangleluran Sumberejo, Tempel Sleman)-d